



## BUPATI SIDENRENG RAPPANG

### PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/ 10 /PANSELDA

### TENTANG

### SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU, TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK**

Jumlah kebutuhan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 sejumlah 345 (tiga ratus empat puluh lima) dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran Pengumuman ini.

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Formasi	Peserta Wajib membaca & memahami Mekanisme Seleksi PPPK
1.	Tenaga Guru	130	Kepmenpan 348 Tahun 2024
2.	Tenaga Kesehatan	63	Kepmenpan 349 Tahun 2024
3.	Tenaga Teknis	152	Kepmenpan 347 Tahun 2024
<b>Jumlah</b>		<b>345</b>	

#### **II. KATEGORI/KRITERIA PELAMAR**

##### **A. Pelamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru:**

1. Kriteria pelamar meliputi:
  - 1) Pelamar Prioritas  
Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
  - 2) Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)  
pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di instansi pemerintah.
  - 3) Guru Non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di Instansi daerah yang terdiri atas:
    - a) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Instansi Pemerintah.
    - b) guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester



secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.

; atau

- 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada Pangkalan data (database) kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Pelamar sebagaimana dimaksud poin 1), 2) dan 3) hanya dapat melamar pada instansi Pemerintah tempat mengajar saat mendaftar.
3. Dalam hal terdapat pelamar prioritas (P1) yang berasal dari luar Instansi Pemerintah atau dari sekolah swasta disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di Instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan.

#### **B. Pelamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan:**

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di instansi pemerintah.
2. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) yang terdiri atas:
  - a) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah; atau
  - b) pegawai yang aktif bekerja pada instansi Pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

#### **C. Pelamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Teknis:**

Kebutuhan Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana teknis diperuntukkan bagi pelamar:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.
2. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) yang terdiri atas:
  - a) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah; atau
  - b) pegawai yang aktif bekerja pada instansi Pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

Pelamar sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 hanya dapat melamar pada instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

### **III. PERSYARATAN PPPK**

#### **A. PERSYARATAN UMUM**

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut :

1. Usia pelamar:
  - a. Untuk Jabatan Fungsional Guru, usia usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK.



- b. Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis dan Pelaksana Teknis, usia usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar PPPK.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
11. Selain ketentuan di atas, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
  - b) tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
  - c) memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas Jabatan yang dilamar untuk pelamar PPPK.

## **B. PERSYARATAN KHUSUS**

### **1. FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU**

- 1) Pelamar Wajib Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
- 2) Pelamar Jabatan Fungsional Guru yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- 3) Pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik.
- 4) Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi:



- a) Pelamar Prioritas
 

Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya dengan urutan kelulusan bagi pelamar prioritas berlaku ketentuan:

  - 1) Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
  - 2) Guru non-ASN.
  - 3) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG); dan
  - 4) Guru swasta (Khusus P1).
- b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di instansi pemerintah.
- c) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Instansi Pemerintah.
- d) guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar, dan
- e) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada Pangkalan data (database) kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## 2. FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

- 1) Pelamar pada seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun Anggaran 2024 **Wajib memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan** dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
- 2) Pelamar yang mendaftar pada **formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, wajib melampirkan STR (bukan *internship*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan Wajib diunggah pada SSCASN.
- 3) Pelamar PPPK JF Kesehatan yang mempunyai Sertifikat Kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tersebut dilampiran pengumuman dapat mempedomani KepmenPANRB No. 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan **wajib diunggah** pada saat pendaftaran di sscasn.
- 4) Setiap pelamar (eks THK-II dan tenaga non-ASN) **wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar** pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
  - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.



- 5) Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagai berikut:
  - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
  - c. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.
- 6) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
- 7) Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi:
  - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di instansi pemerintah;
  - b) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;
  - c) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus.
- 8) Kebutuhan pada Jabatan fungsional Bidan Kategori Keahlian, kebutuhan jabatan tersebut juga dapat dilamar oleh pelamar D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 pada jabatan Fungsional bidan kategori keahlian.
- 9) Penentuan pelamar yang lulus seleksi pada kebutuhan **JF Bidan Kategori Keahlian** diberlakukan secara berurutan bagi:
  - a) Pelamar D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023;
  - b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
  - c) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;
  - d) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus.

### 3. FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA TEKNIS:

- 1) Setiap pelamar wajib **memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar** pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
  - b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
  - c. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- 2) pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- 3) Pelamar PPPK JF Teknis yang mempunyai persyaratan wajib tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tersebut dilampiran pengumuman dapat mempedomani KepmenPANRB No. 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan



Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan **wajib diunggah** pada saat pendaftaran di sscasn.

- 4) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
- 5) Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi:
  - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
  - b) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
  - c) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus.

#### 4. PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS

- 1) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar pada:
  - a) Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis, Jabatan Pelaksana Teknis;
  - b) Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan;
  - c) Kebutuhan Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan Penyandang **Disabilitas daksa** tidak dapat melamar ke Kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Ahli Pertama.
- 2) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas **wajib** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN dengan ketentuan:
  - a) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya (terbaru dan dibuat pada rentang waktu pendaftaran); dan
  - b) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

#### 5. PELAMAR JABATAN ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA DAN PEMADAM KEBAKARAN PEMULA

diwajibkan mengunggah:

- 1) Surat Keterangan Sehat; dan
- 2) Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas

#### 6. KHUSUS untuk jabatan pada lokasi penempatan unit kerja tertentu yang terdiri dari:

- a. Pemula penguji kendaraan bermotor;
- b. Pemula pemadam kebakaran;
- c. Pranata Trantibum.
- d. Operator Layanan Operasional – (Pengemudi Ambulans) diberlakukan persyaratan kompetensi/keahlian/sertifikasi **pengalaman teknis dan kecakapan di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar.**



#### IV. **JADWAL PELAKSANAAN**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, tahapan jadwal pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun Anggaran (T.A.) 2024 dibagi atas 2 (dua) tahapan berdasarkan dengan prioritas kelulusan secara berurutan yakni:

##### 1. **Tahap I:**

- a. Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023);
- b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
- c. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN;

##### 2. **Tahap II:**

Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).

#### **JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK T.A. 2024**

No	Kegiatan	Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024	
		TAHAP I	TAHAP II
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024	9 s.d. 16 April 2025
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025	1 s.d. 30 Juni 2025



## V. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN

### A. PELAMARAN

1. Alur pendaftaran SSCASN 2024: <https://sscasn.bkn.go.id/alur>
2. Pelamar wajib memiliki e-mail yang aktif.
3. Pendaftaran dilakukan secara *online* dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik melalui SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) yang merupakan situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional yang dapat diakses di <https://sscasn.bkn.go.id/> sebagaimana jadwal dan tahapan pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas. Tidak ada pengiriman berkas fisik.
4. Pelamar yang melamar PNS tidak dapat melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam periode tahun yang sama.
5. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu).
6. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
  - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Formasi Tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
8. Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Formasi Tahun 2024 hanya dapat diisi oleh Tenaga Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Pelamar hanya dapat melamar pada unit kerja atau perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan penetapan formasi PPPK yang disediakan;
10. Bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN secara sistem pada saat pembuatan akun pendaftaran di aplikasi SSCASN otomatis diarahkan untuk mengikuti rangkaian seleksi Tahap I yang dimulai pendaftaran pada 1 Oktober 2024;
11. Bagi Pelamar yang tidak masuk dalam kategori yang dimaksud pada angka 10, maka secara sistem pada saat pembuatan akun pendaftaran di aplikasi SSCASN otomatis diarahkan untuk mengikuti rangkaian seleksi Tahap II yang dimulai pendaftaran pada tanggal 17 November 2024
12. Dalam pembuatan akun, proses validasi data kependudukan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL). Jika pelamar mengalami kendala, tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK Calon Pelamar maka dapat menghubungi DUKCAPIL sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang.
13. Pelamar diwajibkan untuk memahami aturan, tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti dan mempelajarinya supaya tidak ada informasi yang tertinggal.



14. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk pindai/scan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.
15. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

## **B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

Kelengkapan administrasi yang akan diunggah berupa pindai/scan berwarna dokumen asli (bukan dokumen foto kopi) bukan hasil dokumen yang difoto yang terdiri dari:

- 1) **Pas Foto** - Asli Pas Photo terbaru pakaian formal dengan ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah polos, tampak depan, foto wajah sampai dengan pundak, posisi Portrait, tampak jelas/tidak blur, tidak miring, bukan foto selfie, cuci cetak (bukan print), bukan file foto yang difoto. Unggahan foto akan dijadikan sebagai database untuk melakukan *face recognition*. Format file JPG. Ukuran maksimal 500 KB;
- 2) **Kartu Tanda Penduduk** - Scan berwarna Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku dan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Tidak Terdaftar sebagai anggota/pengurus Partai Politik dalam database Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) hasil penelusuran NIK pada [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\\_nik](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik). File KTP dan Screenshot diunggah dalam 1 (satu) file Format JPG. Ukuran maksimal 500 KB;
- 3) **Surat Lamaran** - Scan berwarna Asli Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang dalam 1 (satu) halaman kertas ukuran folio, tidak bergaris, dibuat dengan tulisan tangan sendiri dengan tinta hitam, menggunakan huruf kapital, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp. 10.000, harus sesuai format yang dipersyaratkan. Format File PDF. Ukuran maksimal 1000 KB;
- 4) **Ijazah Asli** - Scan Utuh dan berwarna Ijazah asli bukan pindai dari hasil fotocopy yang dilegalisir, Bukan Ijazah hasil Foto, Bukan Surat Keterangan Lulus. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyeteraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 5) **Transkrip atau Daftar Nilai Asli** - Scan utuh dan berwarna Transkrip nilai asli, bukan Transkrip yang difoto, bukan pindai dari hasil fotocopy yang dilegalisir. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Format File PDF. Ukuran maksimal 1000 KB;
- 6) **Surat Pernyataan 5 Poin** - Scan berwarna Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp. 10.000. Format File PDF. Ukuran maksimal 1000 KB;



- 7) **Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK** - Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan dibubuhi meterai Rp. 10.000, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d. 8 (delapan) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar (Lihat ketentuan pada Kepmen PANRB No. 347 Tahun 2024). Format PDF ukuran maksimal 1000 KB.
- 8) **Bukti pengalaman kerja di Instansi** - Scan berwarna Surat keterangan aktif bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan dibubuhi meterai Rp. 10.000. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus. Format PDF ukuran maksimal 1000 KB.
- 9) **Surat Tanda Register (STR) Tenaga Kesehatan** - Scan berwarna dan utuh Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR bagi formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR, Format PDF ukuran maksimal 1000 KB. (JF Kesehatan)
- 10) **Sertifikat Kompetensi Wajib Tambahan, Sertifikat Tambahan Nilai PPPK** - Scan berwarna dan utuh Sertifikat bagi Pelamar PPPK Jabatan Teknis dan Kesehatan yang mempunyai persyaratan wajib tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi bagi Jabatan Fungsional teknis yang mempersyaratkan (Jabatan Teknis dan Kesehatan) Format PDF ukuran maksimal 1000 KB
- 11) **Surat Keterangan Disabilitas** - Scan berwarna dan utuh Surat keterangan Disabilitas bagi pendaftar penyandang disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya. Format PDF ukuran maksimal 1000 KB. (Pelamar Disabilitas).
- 12) **Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas** - Scan berwarna dan utuh Surat keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas Bagi pelamar Format PDF ukuran maksimal 1000 KB. (Pelamar Jabatan Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Pemadam Kebakaran Pemula)
- 13) **Sertifikat Pendidik** - Scan berwarna dan utuh Asli Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki (JF Guru) bila unggahannya tersedia di sscasn (JF Guru);

#### **C. MASA HUBUNGAN KERJA PPPK**

Masa hubungan kerja PPPK Paling singkat 1 (satu tahun dan maksimal) 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

#### **D. SELEKSI**

Seleksi untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja meliputi:

- 1) Seleksi Administrasi, dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Dalam hal tidak memenuhi



persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi

2) **Seleksi Kompetensi**

Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan metode CAT BKN yang memuat Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural; dan Wawancara.

Tidak ada seleksi Kompetensi Teknis tambahan untuk Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Formasi Tahun 2024.

**E. MASA SANGGAH**

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut:

- 1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 2) Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- 3) Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- 4) Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekuranglengkapan dokumen yang dipersyaratkan, ruang lingkup sanggah adalah terkait dengan dokumen yang sudah diupload pada saat pendaftaran

**F. RENCANA TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI**

Titik lokasi Kantor Regional BKN IV Makassar atau titik Lokasi Mandiri BKN yang tersedia pilihannya di sistem.

**G. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

Hasil Seleksi Administrasi akan ditampilkan pada Akun masing-masing. Diharapkan pelamar selalu memantau login akun nya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi Instansi/HELP DESK Instansi.

**H. HELP DESK**

Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Sidenreng Tahun 2024 pada Senin – Jum'at Pukul 08.00 s.d 16.00 Wita (Jam Kerja) melalui:

- a) Website : <https://sidrapkab.go.id/site/>
- b) Informasi : Call Center: 082310477712
- c) Media Sosial : IG & FB : bkpsdmkabsidrap
- d) Email Resmi : [bkpsdmsidrap.berakhlak@gmail.com](mailto:bkpsdmsidrap.berakhlak@gmail.com)
- e) Faq : <https://sscasn.bkn.go.id/faqpppk>

**VI. KETENTUAN LAIN**

- 1) Dasar hukum dan aturan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 : <https://sscasn.bkn.go.id/dasarhukum>
- 2) **Penggunaan meterai** dalam pendaftaran Seleksi PPPK T.A. 2024 diperkenankan bagi pelamar untuk menggunakan meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (tempel) pada dokumen unggahan Surat Lamaran maupun Surat Pernyataan Instansi. Dihimbau kepala pelamar agar tidak menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap Seleksi Administrasi.



- 3) Peserta yang mengunggah dokumen tidak sesuai ketentuan/persyaratan, buram (tidak terbaca jelas) atau tidak mengunggah salah satu dan/atau seluruh persyaratan administrasi pada SSCASN dinyatakan gugur pada tahap seleksi administrasi.
- 4) Format dokumen persyaratan yang wajib di lampirkan dan dapat diakses pada : <http://tiny.cc/FormatPersyaratanSidrap>
- 5) Peserta yang tidak hadir dan/atau mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur.
- 6) Untuk mengikuti seluruh seleksi Penerimaan Pengadaan PPPK Tahun 2024, para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatas namakan Tim Pengadaan CASN Tahun 2024, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2024.
- 7) Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CASN, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
- 8) Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
- 9) Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
- 10) Apabila peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, kemudian terbukti **kualifikasi pendidikannya tidak sesuai** dengan yang dibutuhkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya, **PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan** yang bersangkutan;
- 11) Keputusan Tim Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
- 12) Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui <http://sidrapkab.go.id>. Kelalaian mengetahui informasi terbaru merupakan tanggung jawab masing-masing pelamar.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal / 30 SEPTEMBER 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,  
  
H. BASRA



LAMPIRAN I

NOMOR : 800.1.2.2/ 10 /PANSELDA

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024

**PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI  
PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL  
(KepmenPANRB No. 391 Tahun 2024)**

**I. FORMASI TENAGA KESEHATAN**

No.	Jabatan Fungsional	Persyaratan Wajib Tambahan	Nama Sertifikat/Ketentuan Lain (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket
1.	Administrator Kesehatan		Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
2.	Asisten Apoteker		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau</li> <li>5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.</li> </ol>	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
3.	Pranata laboratorium kesehatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>2 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>3 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau</li> <li>4 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.</li> </ol>	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
4.	Epidemiologi Kesehatan		Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan



No.	Jabatan Fungsional	Persyaratan Wajib Tambahan	Nama Sertifikat/Ketentuan Lain (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket
5.	Tenaga Sanitasi Lingkungan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau</li> <li>5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.</li> </ol>	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
6.	Terapis Gigi dan Mulut		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>2 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau</li> <li>3 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan</li> </ol>	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
7.	Bidan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau</li> <li>5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan</li> </ol>	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
8.	Perawat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</li> <li>4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau</li> <li>5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.</li> </ol>	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan



## II. FORMASI TENAGA TEKNIS

No.	Jabatan Fungsional	Persyaratan WAJIB Tambahan	Nama Sertifikat/Ketentuan Lain (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket
1.	Analisis Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat; dan 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.	Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri	10%	Sertifikat yang telah diregistrasi dan mendapatkan kode verifikasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan dapat diakses melalui tautan <a href="https://registrasi.sidamkar.kemendagri.go.id">https://registrasi sidamkar.kemendagri.go.id</a>
			Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	5%	
			Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	2%	
2.	Pemadam Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat; dan 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.	Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kementerian Dalam Negeri	10%	Sertifikat yang telah diregistrasi dan mendapatkan kode verifikasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan dapat diakses melalui tautan <a href="https://registrasi.sidamkar.kemendagri.go.id">https://registrasi sidamkar.kemendagri.go.id</a>
			Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	5%	
			Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	2%	
3.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 yang diterbitkan oleh LKPP	10%	
4.	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula		Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	5%	
			Sertifikat Otomotif yang diterbitkan oleh BNSP yang masih Berlaku	5%	
5.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama		Sertifikat Kompetensi Profesi Penyuluh Pertanian yang diterbitkan oleh LSP yang terakreditasi BNSP dengan masa berlaku 3 tahun	10%	


  
**Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**
  

  
**H. BASRA**



LAMPIRAN II

NOMOR : 800.1.2.2/10/PANSELDA

TANGGAL : 30 September 2024

RINCIAN PENETAPAN FORMASI PPPK - TENAGA GURU - KESEHATAN - TEKNIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
<b>I. FORMASI TENAGA GURU</b>				<b>130</b>			
1	Guru Ahli Pertama	GURU KELAS-SD		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	Guru Ahli Pertama	GURU PENJASORKES		20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3	Guru Ahli Pertama	GURU KELAS-TK		10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

Pj BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. BASRA



**RINCIAN PENETAPAN FORMASI PPPK - TENAGA GURU - KESEHATAN - TEKNIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
<b>II.</b>	<b>FORMASI TENAGA KESEHATAN</b>			<b>63</b>			
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama		S-1 KEDOKTERAN / S-1 KEDOKTERAN GIGI / PROFESI PSIKOLOGI (MINAT PSIKOLOGI KLINIS) / S-1 PSIKOLOGI (MINAT PSIKOLOGI KLINIS) / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KEBIDANAN / S-1 FARMASI / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 GIZI / S-1 ILMU GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 GIZI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT / S-1 FISIOTERAPI / S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / S-1 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK) / D-IV KEPERAWATAN / D-IV KEBIDANAN / D-IV BIDAN PENDIDIK / D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIK / D-IV GIZI KLINIS / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / D-IV EPIDEMIOLOGI / D-IV KESEHATAN KERJA / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / D-IV PROMOSI KESEHATAN / D-IV FISIOTERAPI / D-IV TERAPI WICARA DAN BAHASA / D-IV OKUPASI TERAPI / D-IV AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL / D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-IV REKAM MEDIS / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KEPERAWATAN GIGI / D-IV KESEHATAN GIGI / D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT / D-IV TERAPI GIGI / D-IV TEKNISI GIGI / D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS / D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN / D-IV TEKNIK RADIOLOGI / D-IV RADIOLOGI / D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK / D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL / D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK / D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / PROFESI DOKTER / PROFESI DOKTER GIGI / PROFESI FISIOTERAPIS / PROFESI APOTEKER / PROFESI NERS / PROFESI BIDAN / PROFESI DIETISIEN	1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
2	Administrator Kesehatan Ahli Pertama		S-1 KEDOKTERAN / S-1 KEDOKTERAN GIGI / S-1 PSIKOLOGI (MINAT PSIKOLOGI KLINIS) / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KEBIDANAN / S-1 FARMASI / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 GIZI / S-1 ILMU GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 GIZI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN KERJA / S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT / S-1 FISIOTERAPI / S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / S-1 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK) / D-IV KEPERAWATAN / D-IV KEBIDANAN / D-IV BIDAN PENDIDIK / D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIK / D-IV GIZI KLINIS / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / D-IV EPIDEMIOLOGI / D-IV KESEHATAN KERJA / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / D-IV PROMOSI KESEHATAN / D-IV FISIOTERAPI / D-IV TERAPI WICARA DAN BAHASA / D-IV OKUPASI TERAPI / D-IV AKUPUNTUR DAN PENGOBATAN HERBAL / D-IV AKUPUNKTUR / D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-IV REKAM MEDIS / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KEPERAWATAN GIGI / D-IV KESEHATAN GIGI / D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT / D-IV TERAPI GIGI / D-IV TEKNISI GIGI / D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS / D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN / D-IV TEKNIK RADIOLOGI / D-IV RADIOLOGI / D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK / D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL / D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGGOK / D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / PROFESI DOKTER / PROFESI DOKTER GIGI / PROFESI PSIKOLOGI (MINAT PSIKOLOGI KLINIS) / PROFESI APOTEKER / PROFESI NERS / PROFESI BIDAN / PROFESI DIETISIEN / PROFESI FISIOTERAPIS	1	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah		Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan
3	Asisten Apoteker Terampil		D-III FARMASI	1	UPT RSUD Arifin Nu'mang		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.



NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
4	Bidan Ahli Pertama		D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / PROFESI BIDAN / SARJANA SAINS TERAPAN KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	2	UPT Puskesmas Barukku		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan
5	Bidan Ahli Pertama		PROFESI BIDAN / D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / SARJANA SAINS TERAPAN KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	1	UPT Puskesmas Belawae		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan
6	Bidan Ahli Pertama		D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / PROFESI BIDAN / SARJANA SAINS TERAPAN KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	2	UPT Puskesmas Dongi		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
7	Bidan Ahli Pertama		D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / PROFESI BIDAN / SARJANA SAINS TERAPAN KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	3	UPT Puskesmas Kulo		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan
8	Bidan Ahli Pertama		D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / PROFESI BIDAN / SARJANA SAINS TERAPAN KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	2	UPT Puskesmas Lawawoi		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan
9	Bidan Ahli Pertama		D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / PROFESI BIDAN / SARJANA SAINS TERAPAN KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	1	UPT Puskesmas Pangkajene		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan



NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
10	Bidan Ahli Pertama		D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / PROFESI BIDAN / SARJANA SAINS TERAPAN KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	3	UPT Puskesmas Rappang		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan
11	Bidan Ahli Pertama		D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / PROFESI BIDAN / SARJANA SAINS TERAPAN KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	4	UPT Puskesmas Tanrutedong		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan
12	Bidan Ahli Pertama		D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / PROFESI BIDAN / SARJANA SAINS TERAPAN KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	3	UPT RSUD Arifin Nu'mang		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
13	Bidan Ahli Pertama		D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / PROFESI BIDAN / SARJANA SAINS TERAPAN KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	2	UPT RSUD Nene Mallomo		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan
14	Bidan Terampil		D-III KEBIDANAN	3	UPT Puskesmas EmpagaE		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan
15	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama		D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI) / S-2 EPIDEMIOLOGI / S-2 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI)	1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan
16	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama		D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI) / S-2 EPIDEMIOLOGI / S-2 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI)	1	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah		Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan



NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
17	Perawat Ahli Pertama		D-IV KEPERAWATAN / PROFESI NERS	1	UPT Puskesmas Bilokka		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
18	Perawat Ahli Pertama		PROFESI NERS	1	UPT Puskesmas EmpagaE		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
19	Perawat Ahli Pertama		D-IV KEPERAWATAN / PROFESI NERS	2	UPT RSUD Arifin Nu'mang		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
20	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Baranti		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.



NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
21	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	3	UPT Puskesmas Barukku		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
22	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Barukku   PUSTU BILA RIASE		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
23	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Barukku   PUSTU COMPONG		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
24	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Barukku   PUSTU LEPPANGENG		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.



NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
25	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	3	UPT Puskesmas Belawae		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
26	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Bilokka   PUSTU WANIO		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
27	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Dongi		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
28	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Dongi   PUSTU BULUCENRANA		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.



NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
29	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas EmpagaE   PUSTU AKA AKAE		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
30	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas EmpagaE   PUSTU TALAWE		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
31	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Kulo		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
32	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Lancirang		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.



NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
33	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Manisa		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
34	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Pangkajene   PUSTU ALLAKKUANG		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
35	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Tanrutedong		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
36	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	1	UPT Puskesmas Tanrutedong   PUSTU BILA		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
37	Perawat Terampil		D-III KEPERAWATAN	2	UPT RSUD Arifin Nu'mang		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
38	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil		D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / D-III KIMIA / D-III ANALIS KIMIA / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	3	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah		1 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 4 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.
39	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama		D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT KESEHATAN LINGKUNGAN)	1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.



NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
40	Terapis Gigi dan Mulut Terampil		D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT / AKADEMI KESEHATAN GIGI / AKADEMI KEPERAWATAN GIGI	1	UPT Puskesmas Belawae		1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 3 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan

**Pi. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**  
  
**H. BASRA**

## LAMPIRAN IV

NOMOR : 800.1.2.2/10/PANSELDA

TANGGAL : 30 September 2024

**RINCIAN PENETAPAN FORMASI PPPK - TENAGA GURU - KESEHATAN - TEKNIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
<b>III.</b>	<b>FORMASI TENAGA TEKNIS LAINNYA</b>			<b>152</b>			
1	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK	1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat; dan 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.	1. Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri 2. Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 MATEMATIKA	1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
3	Arsiparis Terampil	BENDAHARA	D-III AKUNTANSI	1	UPT Puskesmas Manisa		
4	Medik Veteriner Ahli Pertama	DOKTER HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN / S-2 DOKTER HEWAN	1	Dinas Peternakan dan Perikanan		
5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
6	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Amparita		
7	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Baranti		
8	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Barukku		
9	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Belawae		
10	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Bilokka		
11	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Dongi		
12	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas EmpagaE		
13	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Kulo		

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
14	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Lancirang		
15	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Lawawoi		
16	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Manisa		
17	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Pangkajene		
18	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Rappang		
19	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Tanrutedong		
20	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	UPT RSUD Arifin Nu'mang		
21	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGEMUDI AMBULANS	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	UPT RSUD Nene Mallomo		
22	Pemadam Kebakaran Pemula	Petugas Operasional Pemadam Kebakaran	SLTA/SMA SEDERAJAT	5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat; dan 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.	1. Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kementerian Dalam Negeri 2. Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
23	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMPUTER	1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
24	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 EKONOMI DAN MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMPUTER	1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
25	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN / D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
26	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
27	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	D-IV/S-1 AKUNTANSI / D-IV/S-1 EKONOMI / D-IV/S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV/S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 HUKUM / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 PERTANIAN AGRIBISNIS / S-1 AKUNTANSI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	1	Badan Pendapatan Daerah		



NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
28	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 PERTANIAN AGRIBISNIS / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
29	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 MESIN / S-1 GEOFISIKA	1	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat		
30	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PARIWISATA / D-IV KEARSIPAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
31	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 FARMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
32	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Bendahara	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
33	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Bendahara	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1	UPT Puskesmas Manisa		
34	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Bendahara	S-1 AKUNTANSI	1	UPT RSUD Arifin Nu'mang		
35	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 FARMASI / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	3	UPT RSUD Arifin Nu'mang		
36	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 EKONOMI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	UPT RSUD Arifin Nu'mang		
37	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 AKUNTANSI	1	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
38	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 ILMU KOMPUTASI	1	Dinas Lingkungan Hidup		
39	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PERTANIAN / S-1 EKONOMI	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak		
40	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM	1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
41	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 1 ARAWA		
42	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 1 BELAWAE		

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
43	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 1 BILA		
44	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV EKONOMI / S-1 EKONOMI / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 1 BILOKKA		
45	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 1 LAWAWOI		
46	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	UPT SD NEGERI 1 OTTING		
47	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 1 PANGKAJENE		
48	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 1 RAPPANG		
49	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 10 PANGKAJENE		
50	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 11 PANGKAJENE		
51	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 12 PANGKAJENE		

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
52	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 13 TANRUTEDONG		
53	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 2 KULO		
54	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 2 MOJONG		
55	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 2 RAPPANG		
56	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 3 ARAWA		
57	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 3 BATU		
58	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 3 MASSEPE		
59	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 3 WATANG SIDENRENG		
60	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 4 BELAWAE		

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
61	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 5 BENTENG		
62	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 5 KULO		
63	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 6 ARAWA		
64	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 6 RAPPANG		
65	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 6 TANRUTEDONG		
66	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	UPT SD NEGERI 7 LANCIRANG		
67	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP NEGERI 1 DUA PITUE		



NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
68	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP NEGERI 1 PANGSID		
69	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE		
70	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP NEGERI 1 WATANG PULU		

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
71	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP NEGERI 2 BARANTI		
72	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP NEGERI 2 DUA PITUE		
73	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	D-IV EKONOMI / D-IV MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP NEGERI 2 PANCA LAUTANG		

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
74	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP Negeri 2 Watang Sidenreng		
75	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP NEGERI 3 PANCA RIJANG		
76	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP Negeri 3 Pangsid		

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
77	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP NEGERI 3 PITU RIASE		
78	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP NEGERI 4 DUA PITUE		
79	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA / D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN AGAMA / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM / S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	UPT SMP NEGERI 4 PITU RIAWA		
80	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 SYARIAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 FARMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		



NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
81	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL / S-1 TEKNIK ELEKTRO/TEKNIK ELEKTRONIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
82	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	Dinas Perhubungan   Sekretariat		
83	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	D-IV PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	Dinas Sosial		
84	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMPUTER	1	Inspektorat Daerah		
85	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	1	Kecamatan Dua PituE		
86	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN	1	Kecamatan Kulo		
87	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN	1	Kecamatan MaritengngaE		
88	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	Kecamatan Panca Lautang		
89	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN	1	Kecamatan Panca Rijang		
90	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU HUKUM	1	Kecamatan Pitu Riase		
91	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 SARJANA HUKUM / S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN	1	Kecamatan Pitu Riawa		
92	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	Kecamatan Tellu LimpoE		
93	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1	Kecamatan Watang Pulu		
94	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Analisis tata Usaha	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS / S-1 FARMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 AGROTEKNOLOGI	1	Kecamatan Watang Sidenreng		
95	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Tata Usaha Pimpinan	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL / S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU POLITIK / S-1/D-IV BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN ISLAM	2	Bagian Umum dan Protokol		
96	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	Penata Penanggulangan Bencana	S-1 GEOGRAFI / S-1 HUKUM / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK GEOLOGI	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
97	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Kepegawaian	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT Puskesmas Kulo		
98	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Keuangan	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	UPT RSUD Arifin Nu'mang		
99	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Kepegawaian	SLTA/SMA SEDERAJAT	3	UPT RSUD Nene Mallomo		
100	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Kepegawaian	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	Kecamatan Baranti   Sekretariat		
101	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Kepegawaian	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	Kecamatan Dua PituE		
102	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Kepegawaian	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	Kecamatan Kulo		

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
103	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Kepegawaian	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	Kecamatan MaritengngaE		
104	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Kepegawaian	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	Kecamatan Panca Lautang		
105	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Kepegawaian	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	Kecamatan Panca Rijang		
106	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Kepegawaian	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	Kecamatan Pitu Riawa		
107	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Kepegawaian	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	Kecamatan Tellu LimpoE		
108	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelola Kepegawaian	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	Kecamatan Watang Sidenreng		
109	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Tata Usaha Pimpinan	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	Bagian Umum dan Protokol		
110	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	D-III ILMU PERPUSTAKAAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III EKONOMI AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ILMU PEMERINTAHAN / D-III ILMU KOMUNIKASI	1	UPT SMP NEGERI 1 PANCA RIJANG		
111	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan, Pengelola Data dan Sistem Manajemen Pembelajaran, Pengelola Bantuan Pendidikan, Pengelola Kurikulum, Pengelola Laboratorium Komputer, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengadministrasi PTK, Pustakawan	D-III ILMU PERPUSTAKAAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III EKONOMI AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ILMU PEMERINTAHAN / D-III ILMU KOMUNIKASI / D-III TEKNIK KOMPUTER	1	UPT SMP NEGERI 4 BARANTI		
112	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 GEOFISIKA / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	2	Bagian Pengadaan Barang / Jasa		Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 yang diterbitkan oleh LKPP

NO.	NAMA JABATAN	NAMA SUB JABATAN	Pendidikan Nama	JUMLAH	Unit Penempatan	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
113	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	Petugas Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	SMA IPA / SMK TEKNIK	2	Dinas Perhubungan		1. Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2. Sertifikat Otomotif yang diterbitkan oleh BNSP yang masih Berlaku
114	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Penyuluh Pertanian	S-1 PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV KESEHATAN HEWAN / S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK / S-1 PEMULIAAN DAN PRODUKSI TERNAK / S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN / S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN / S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK	2	Dinas Peternakan dan Perikanan		Sertifikat Kompetensi Profesi Penyuluh Pertanian yang diterbitkan oleh LSP yang terakreditasi BNSP dengan masa berlaku 3 tahun
115	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Penyuluh Pertanian	S-1 AGRIBISNIS / D-IV PENYULUH PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGROKOTEKNOLOGI / S-1 AGRONOMI / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 ILMU TANAH / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN	1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan		Sertifikat Kompetensi Profesi Penyuluh Pertanian yang diterbitkan oleh LSP yang terakreditasi BNSP dengan masa berlaku 3 tahun
116	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 HUKUM	1	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
117	PRANATA TRANTIBUM	Petugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja	SLTA/SMA SEDERAJAT	18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		

**Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**H. BASRA**